

Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Putri Aprilia

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Irfan Sophan Himawan

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin SH. No. 50 Sukabumi, Telpon 0228345. Fax 022-218342

Korespondensi Penulis: putriapriliah2023@gmail.com

Abstract. *Good governance procedures that are implemented properly can avoid opportunities for fraud to occur. In addition, preventing fraud can be done by implementing the Government Internal Control System (SPIP). The purpose of this study is to explain the influence of the government's internal control system through accountability for fraud. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by distributing 60 questionnaires. The population in this study were all village officials in the Cibitung sub-district. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis techniques and path analysis with the help of the SPSS version 26 program. The results of this study indicate that good governance has an effect on fraud while the government internal control system (SPIP) has no effect on fraud, good governance has an effect on fraud through accountability and the government's internal control system (SPIP) influences fraud through accountability.*

Keywords: *Good Governance, Government Internal Control System, Fraud, Accountability.*

Abstrak. Prosedur *Good Governance* yang diterapkan dengan baik dapat menghindari peluang terjadinya tindakan *fraud*. Selain itu dalam mencegah terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh *good governance* sistem pengendalian intern pemerintah melalui akuntabilitas terhadap *fraud*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner sebanyak 60. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai desa pada kecamatan cibitung. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap *fraud* sementara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap *fraud*, *good governance* berpengaruh terhadap *fraud* melalui akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *fraud* melalui akuntabilitas.

Kata kunci: *Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Fraud, Akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa telah menjadikan desa sebagai awal mula pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber dana dan juga kewenangan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Kemudian anggaran dana desa tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *fraud*.

Fraud adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja baik individu maupun kelompok yang mempunyai wewenang tanggungjawab tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi. maka diperlukannya tindakan pencegahan terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan (*Fraud*) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Akhyar et al. 2022)

Dengan demikian tindakan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Governance* (GG). *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan *fraud* baik secara politik maupun administrasi, dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha (Anisa and Syarif 2020).

Kemudian upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (SPIP) adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” (Ayem and Kusumasari 2020)

Dari uraian diatas bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah sangat penting untuk meningkatkannya diperlukan pencegahan fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi sehingga penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Good Governance*

Menurut (Rahmatika, 2020) *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara dominan-dominan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut (Ayem and Kusumasari, 2020) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian *Fraud*

Menurut (Rahmatika, 2020) menjelaskan bahwa *Fraud* adalah segala bentuk perbuatan penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Nafidah & Anisa, 2017) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan dan kegiatan seseorang atau pengurus unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk meneliti pengaruh *good governance* dan system pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi (studi pada desa dikecamatan cibitung). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai desa pada kecamatan cibitung yang berjumlah 6 desa. Mengingat besarnya jumlah populasi pada penelitian ini, maka pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah responden yang digunakan sebesar 60 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 60 responden yang telah ditetapkan dalam penelitian. Kuesioner yang diperoleh diuji menggunakan validitasi dan reabilitas untuk menguji kelayakan data kuesioner yang diperoleh. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, analisis jalur dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Good Governance Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa good governance terhadap akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang dimana menunjukkan bahwa nilai thitung untuk good governance sebesar $2,523 > t_{tabel} (2,002)$. Kemudian untuk nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,014$ sehingga $sig < 0,05$. Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel good governance terhadap akuntabilitas. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik good governance yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yang menjelaskan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dianggap berhasil jika realisasi anggaran digunakan sepenuhnya dan seluruh proses secara umum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang kredibel didukung oleh instansi pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel agar menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan begitu akuntabilitas kinerja dapat dicapai dalam praktik nyata. Pemerintah sebagai sebuah entitas sekaligus pelaksana teknis dan kebijakan wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang berlaku secara umum serta memiliki ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan yang tinggi akan berdampak signifikan terhadap sejauh mana instansi pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Standar penyelenggaraan akuntansi pemerintah saat ini didukung oleh sejumlah peraturan lain dengan tujuan yang sama. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh semua pihak dengan harapan dapat memitigasi berbagai bentuk kecurangan dan tantangan utama dalam pencapaian prestasi akuntabilitas. Sarana pengendalian dan penilai kualitas kinerja digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance. Adanya kepentingan tersebut mengindikasikan terbentuknya hubungan antara penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Israr & Syofyan, 2022).

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang dimana menunjukkan bahwa nilai thitung untuk sistem pengendalian internal pemerintah sebesar $4,311 > t_{tabel} (2,002)$. Kemudian untuk nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,000$ sehingga $sig < 0,05$. Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Husain & Seber (2023) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan keyakinan terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa. Dan pada akhirnya akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik bagi pemerintah desa. Dengan sistem pengendalian internal yang baik dilakukan oleh pemerintah desa dapat memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, keandalan laporan keuangan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil ini maka yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengendalian intern yakni komunikasi dan informasi dari seluruh elemen terkait dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pada tahapan kegiatan pengendalian harus perlu untuk ditingkatkan agar pengelolaan dana desa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik dan dapat meminimalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi (Husain & Seber, 2023).

3. Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa good governance terhadap pencegahan fraud berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang dimana menunjukkan bahwa nilai thitung untuk good governance sebesar $2,075 > t_{tabel} (2,002)$. Kemudian untuk nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,043$ sehingga $sig < 0,05$. Maka dapat

disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel good governance terhadap pencegahan fraud. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik good governance yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat pencegahan fraud, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik karena meminimalisir bentuk perbuatan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Farochi & Nugroho (2022) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud” yang menjelaskan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa good corporate governance akan mengurangi resiko penyalahgunaan atau pencegahan kecurangan. Ini berarti bahwa pelaksanaan good corporate governance mampu mencegah terjadinya kecurangan karena setiap prinsip good corporate governance selalu berkaitan dengan sifat keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan adanya kontrol. Untuk dapat melaksanakan good corporate governance sebagaimana yang diharapkan semua pihak, diperlukan peran yang optimal dari komite audit, pengendalian internal, dan audit internal. Dengan terlaksananya good corporate governance diharapkan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang merugikan dapat dikurangi bahkan dihindari.

Secara umum, terdapat tiga alat pencegahan kecurangan yaitu: good corporate governance, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan pengendalian internal. Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya suatu pencegahan fraud bergantung pada penerapan good corporate governance yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, dan kewajaran adalah prinsip-prinsip good corporate yang memiliki hubungan sebab akibat. Penerapan harus sesuai atau sejalan dengan prinsip good corporate governance. Bilamana ada dari prinsip – prinsip good corporate governance tidak jalan ataupun tidak diterapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pencegah fraud yang dilakukan tidak maksimal (Farochi & Nugroho, 2022).

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang dimana menunjukkan bahwa nilai thitung untuk sistem pengendalian intern pemerintah

sebesar $2,750 > t_{tabel} (2,002)$. Kemudian untuk nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,008$ sehingga $sig < 0,05$. Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat pencegahan fraud, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik karena meminimalisir bentuk perbuatan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho & Afifi (2022) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud” yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Semakin bagus suatu penerapan pengendalian internal perusahaan maupun lembaga, maka semakin meningkat pula pencegahan terhadap sebuah kecurangan yang terjadi dalam sesuatu perusahaan ataupun lembaga dimana sudah ada pengendalian internal yang meningkatkan upaya pencegahan kecurangan (fraud). Jika tujuan lembaga ataupun perusahaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan maka pengendalian internal yang diterapkan terbilang berhasil dan maupun untuk memaksimalkan pencegahan fraud.

Dalam suatu organisasi, pengendalian internal dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik itu disengaja maupun tidak, akan dapat ditekan sekecil mungkin. Pengendalian internal ini tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu diperlukan pengendalian internal yang membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaan (Samanto dkk., 2022). Efektivitas pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila pengendalian internal semakin efektif diterapkan oleh organisasi. Pengendalian internal yang efektif membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran (Nugroho & Afifi, 2022).

5. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa akuntabilitas terhadap pencegahan fraud berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang dimana menunjukkan bahwa nilai thitung untuk akuntabilitas sebesar $2,583 > t_{tabel} (2,002)$. Kemudian untuk nilai

signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,012 sehingga $\text{sig} < 0,05$. Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap pencegahan fraud. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik akuntabilitas yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat pencegahan fraud, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik karena meminimalisir bentuk perbuatan penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan desa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari pembuatan laporan realisasi alokasi dana desa tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dilihat dari karakteristik responden pada tingkat akhir pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang/profesi yang dimiliki, tetapi dengan adanya pelatihan dan pengalaman kerja aparatur akan memiliki kemampuan yang lebih, semakin lama bekerja dalam suatu bidang dalam organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Penyajian laporan realisasi alokasi dana desa, laporan pertanggung jawaban dan pelaporan tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik (Aulia dkk, 2023).

6. Pengaruh Good Governance Melalui Akuntabilitas Terhadap Fraud

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa good governance melalui akuntabilitas terhadap pencegahan fraud berpengaruh secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian melalui software Sobel Test Calculation dan diperoleh nilai nilai signifikansi 0,025 dimana nilai tersebut kurang dari nilai sig. (0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,309 yang menunjukkan pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan, bahwa good governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui akuntabilitas. Pengaruh dengan arah positif dapat diartikan bahwa semakin baik good governance, maka akan semakin baik akuntabilitas dan berdampak pada peningkatan pencegahan fraud, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik melalui akuntabilitas karena meminimalisir

bentuk perbuatan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfian & Arum (2023) dengan judul “Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah” yang menjelaskan bahwa good governance melalui akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam good corporate governance terdapat 5 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan adalah upaya yang dilakukan sebuah organisasi bisnis untuk membangun kepercayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas penting karena berkaitan dengan standar pengukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau organisasi. Akuntabilitas juga terbukti dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dalam teori stakeholder, akuntabilitas organisasi jauh lebih penting dibandingkan kinerja keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai sikap Amanah sebuah organisasi.

Akuntabilitas pada organisasi dapat ditandai dengan adanya pelaporan keuangan yang dilakukan dengan baik. Penerapan good governance yang dilakukan suatu organisasi akan dapat memaksimalkan fungsi pengawasan yang akan memonitor seluruh aktivitas perusahaan agar tidak terjadi kecurangan (Fraud) terutama dalam proses pelaporan laporan keuangan. Isu mengenai hubungan antara prinsip akuntabilitas yang sering sekali dikaitkan dengan bentuk pencegahan kecurangan menjadi masuk akal. Hal tersebut dapat terjadi karena mekanisme organisasi yang dapat mengidentifikasi prinsip akuntabilitas dapat sekaligus menjadi sebuah pengendalian internal yang mengurangi potensi terjadinya kecurangan (Alfian & Arum, 2023).

7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melalui Akuntabilitas Terhadap Fraud

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah melalui akuntabilitas terhadap pencegahan fraud berpengaruh secara signifikan. Hal ini diketahui dari hasil pengujian melalui software Sobel Test Calculation dan diperoleh nilai nilai signifikansi 0,009 dimana nilai tersebut kurang dari nilai sig. (0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,309 yang menunjukkan pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui akuntabilitas. Pengaruh dengan arah positif dapat

diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka akan semakin baik akuntabilitas dan berdampak pada peningkatan pencegahan fraud, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik melalui akuntabilitas karena meminimalisir bentuk perbuatan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayem & Kusmasari (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi” yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah melalui akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal pemerintah dan juga akuntabilitas telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Akuntabilitas sebagai pemegang kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengendalian internal merupakan upaya perusahaan dalam melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan sudah akurat, serta meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Kecurangan (fraud) dapat terjadi jika pengendalian internal dalam suatu organisasi belum dilaksanakan secara efektif. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan akan sangat besar. Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik. Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka pengelolaan keuangan akan semakin akuntabel, sehingga fraud akan semakin mudah untuk dicegah (Ayem & Kusmasari, 2020).

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh yang menyebabkan hubungan antara *good governance*, pengendalian *intern* pemerintah dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan pada Desa di Kecamatan Cibitung.

Dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang sudah dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis dengan berpengaruhnya akuntabilitas disebabkan karena *good governance* memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap akuntabilitas. Berkualitasnya akuntabilitas pada penelitian ini disebabkan oleh baiknya sistem pemerintah yang dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Cibitung sehingga dapat membentuk *good governance* yang baik.
2. Hasil pengujian hipotesis dengan berpengaruhnya akuntabilitas disebabkan karena pengendalian internal pemerintah memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap akuntabilitas. Berkualitasnya akuntabilitas pada penelitian ini disebabkan oleh baiknya sistem pengendalian internal pemerintah yang dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Cibitung sehingga dapat membentuk sistem pengendalian internal yang baik.
3. Hasil pengujian hipotesis dengan berpengaruhnya pencegahan *fraud* disebabkan karena *good governance* memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berkualitasnya pencegahan *fraud* pada penelitian ini disebabkan oleh baiknya sistem pemerintah yang dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Cibitung sehingga dapat membentuk *good governance* yang baik.
4. Hasil pengujian hipotesis dengan berpengaruhnya pencegahan *fraud* disebabkan karena pengendalian internal pemerintah memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berkualitasnya pencegahan *fraud* pada penelitian ini disebabkan oleh baiknya sistem pemerintah yang dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Cibitung sehingga dapat membentuk pengendalian internal pemerintah yang baik.
5. Hasil pengujian hipotesis dengan berpengaruhnya pencegahan *fraud* disebabkan karena akuntabilitas memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berkualitasnya pencegahan *fraud* pada penelitian ini disebabkan oleh baiknya akuntabilitas yang dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Cibitung sehingga dapat sistem keuangan yang baik.
6. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bawah penerapan pencegahan *fraud* juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dimana akuntabilitas yang baik disebabkan oleh *good governance* yang berkualitas. Tingginya tingkat pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh akuntabilitas yang baik dan akuntabilitas yang baik dipengaruhi oleh keadaan pemerintah atau perangkat desa yang baik pula.

7. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bawah penerapan pencegahan *fraud* juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dimana akuntabilitas yang baik disebabkan oleh pengendalian internal pemerintah yang berkualitas. Tingginya tingkat pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh akuntabilitas yang baik dan akuntabilitas yang baik dipengaruhi oleh keadaan pemerintah atau perangkat desa yang baik pula.

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran dengan menambah variabel lain seperti transparansi, partisipasi dan responsibility yang diduga memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud, dapat juga ditambah dengan metode wawancara serta menambahkan jumlah sampel dan populasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Alfian, A.H., & Arum, D.S. (2023). Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah. *Jurnal STIE Semarang*, 15(2), 178–189.
- Anisa, N. V., & Syarief, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 45–52.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112–2120.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160.
- Farochi, M.F.F., & Nugroho, A.H.D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 86–92.
- Husain, S.P, & Seber, I.S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76.
- Israr, N.H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(4), 686–697.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288.
- Nugroho, D.H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316.
- Rahmatika, Dien N. 2020. *Fraud Auditing*. Yogyakarta:Deepublish.